



► KEAMANAN PANGAN

SPPG Didorong Segera Kantongi SLHS

UMBULHARJO - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Jogja untuk segera memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS). Langkah ini dinilai sangat krusial guna memastikan keamanan pangan dan menjaga mutu layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Stefani Yulindriani
stefani@harianjogja.com

Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja, Umi Nur Chariyati, mengungkapkan hingga saat ini terdapat 21 SPPG di Kota Jogja yang telah terdaftar di Badan Gizi Nasional (BGN). Dari jumlah tersebut, 17 SPPG telah mengajukan permohonan SLHS melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS). "Kami sudah melakukan visitasi terhadap seluruh SPPG yang mengajukan SLHS. Namun, belum semuanya memenuhi standar hygiene sanitasi yang ditetapkan," kata Umi, Sabtu (3/1).

Berdasarkan hasil penilaian, delapan SPPG dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan surat rekomendasi

► Dari 21 SPPG di Kota Jogja yang telah terdaftar di BGN, 17 SPPG di antaranya telah mengajukan permohonan SLHS.

► Jaminan keamanan pangan diukur dari pemenuhan standar hygiene sanitasi pada setiap SPPG.

SLHS. Sementara, sembilan SPPG lainnya masih dalam tahap perbaikan pascapenilaian, khususnya pada aspek teknis hygiene sanitasi agar sesuai dengan standar yang berlaku.

Ia menambahkan, hingga kini Dinkes Kota Jogja masih menunggu penyelesaian perbaikan dari sembilan SPPG tersebut sebelum proses penerbitan SLHS dapat dilanjutkan.

Di sisi lain, Umi juga mendorong sejumlah SPPG yang belum mengajukan permohonan SLHS agar segera mengurus sertifikasi tersebut. Menurutnya, SLHS menjadi instrumen penting untuk menjamin keamanan pangan yang disajikan kepada masyarakat. "Jaminan keamanan pangan diukur dari pemenuhan standar hygiene sanitasi pada setiap SPPG yang dibuktikan melalui kepemilikan SLHS," ujarnya.

Ia menjelaskan, SLHS diterbitkan sebagai bukti kelaikan setelah tim penilai melakukan penilaian secara menyeluruh melalui kunjungan langsung ke lokasi SPPG.

Lebih lanjut, Dinkes Kota Jogja secara berkelanjutan melakukan pembinaan, pendampingan, serta penilaian hygiene sanitasi terhadap SPPG sebagai bagian dari upaya pengendalian mutu layanan

pemenuhan gizi di Kota Jogja.

Percepatan

Sebelumnya, Pemda DIY juga terus mendorong SPPG untuk mendapatkan SLHS. Untuk percepatan, SPPG tidak harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) karena diperlakukan sebagai satuan pelayanan.

Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan surat edaran percepatan pemenuhan SLHS dengan memberikan kemudahan bagi SPPG untuk tidak memakai NIB, sebagaimana disyaratkan dalam *Online Single Submission* (OSS). "Pada prinsipnya, SPPG bukan sebuah usaha, tetapi layanan seperti instalasi gizi di rumah sakit, sehingga tidak perlu memakai NIB, dan dapat langsung ke SLHS," ujarnya, belum lama ini. Dengan kemudahan ini, Dinas Kesehatan dapat semakin cepat mengurus SLHS untuk SPPG. Meski demikian, bukan berarti proses SLHS tidak membutuhkan waktu. "Tetap perlu verifikasi dan sebagainya," katanya.

Pemda DIY juga mengidentifikasi SPPG berdasarkan kriteria pemeringkatan, yang terdiri dari baik, sedang, dan kurang. SPPG dengan kondisi kurang berarti terdapat

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|--------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Kesehatan | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 06 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005